

**KEBIJAKAN RESOLUSI**  
**(Pembangunan Bendungan Boiya Sidrap-Enrekang)**

**Barisan**

STISIP Muhammadiyah Rappang  
[uchenklppmstisip@yahoo.co.id](mailto:uchenklppmstisip@yahoo.co.id)

**Haeruddin**

STISIP Muhammadiyah Rappang  
 Abstrac

This research aim to know and analysis steps resolution by complicit the dam growing plan at Boya Enrekang Regency. This complicit begin from there was policy government who plan act build a dam. This policy get opposed from the people distric Maiwa speciaally from the villages will destroyed after build this dam.As the result, this researh pind out strategic manage complicit who use this era is silent problem seems the builds will not realisation. So step complicit resolution who effering is government must be used compromis to the people. So ready to get policy, but government must be change their fields whose destroyed. With new fields, so government give an accomodation as asubsidi for the peopel who was moved.

***Keywords: Resolutions Complicit and Growed***

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui langkah resolusi atas konflik rencana pembangunan bendungan di Boya Kabupaten Enrekang. Konflik tersebut bermula dari adanya kebijakan pemerintah yang berencana untuk melakukan pembangunan bendungan. Kebijakan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Kecamatan Maiwa khususnya dari desa yang akan ditenggelamkan setelah pembangunan tersebut selesai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan konflik yang digunakan pemerintah saat ini adalah dengan mendiamkan masalah tersebut seakan-akan pembangunan tidak akan dilaksanakan. Adapun langkah resolusi konflik yang ditawarkan yaitu pemerintah seharusnya menempuh jalan kompromi kepada masyarakat, agar bersedia untuk menerima kebijakan dengan cara, pemerintah harus mengganti lahan masyarakat yang tenggelam dengan lahan baru serta pemerintah juga memberikan akomodasi sebagai subsidi kepada masyarakat yang dipindahkan.

**Kata Kunci: Resolusi Konflik dan Pembangunan**

## A. PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Menurut (Antonius, dkk, 2002) konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. Sedangkan (L. Scannell dan R. Gifford, 2010) konflik adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu. (Pruitt dan Rubin, 2009) menjelaskan, “konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan”. Sejalan dengan pendapat tersebut diketahui bahwa konflik yang terjadi akibat dari adanya pembangunan bendungan di Desa Boiya Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, adalah merupakan perbedaan pandangan dari beberapa pihak.

Pihak-pihak yang dianggap berbedah pandangan terjadi antara pemerintah dengan masyarakat Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Bendungan itu akan menghidupi masyarakat tiga daerah, Sidrap, Enrekang dan Parepare. “Bendungan berkapasitas 80 sampai 100 juta meter kubik itu, disamping untuk perluasan areal baru, juga akan menjadi sumber air terbesar. Keistimewaan lain dari bendungan itu, juga akan menjadi pengendali banjir, sumber energi listrik serta pariwisata dan perikanan (berita kota Makassar, 2016). Sementara itu bermunculan banyak penolakan dari masyarakat karena menganggap bahwa pembangunan tersebut justru membawah banyak kerugian bagi warga Kabupaten Enrekang sedangkan daerah yang lebu diuntungkan adalah Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ratusan massa mengatasnamakan Maiwa Bersatu (MABES) Enrekang, melakukan aksi unjuk rasa. Aksi tersebut, menuntut pembangunan bendungan Boya di aliran Sungai Saddang Kalempang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekng. Pasalnya, para pengunjung rasa menilai pembangunan

bendungan tersebut dikuwatirkan beberapa desa sekitar lokasi pembangunan tenggelam. “100 persen Desa Tuncung akan tenggelam dan Desa Mangkawani juga ikut tenggelam, karna ketinggiannya hanya 50 meter dan tidak menutup kemungkinan akan berimbas ke desa lain,” ungkap Koordinator Lapangan Mabes, Andi Riya Rifaldi, saat menyampaikan aspirasinya (Parepos.co.id, 2016).

Pembangunan bendungan rencananya berada tepat diperbatasan kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan demikian maka diketahui bahwa genangan air akan menenggelamkan daerah/desa-desa di Kabupaten Enrekang tepat di Kecamatan Maiwa. Sejalan dengan adanya penolakan dari warga maiwa tersebut, maka pemerintah Kabupaten Enrekang melalui Sekretaris Daerah (Sekda) untuk memberikan pernyataan. Sekretaris Daerah (Sekda) Enrekang Chairul Latanro beserta Ratusan massa menolak pembangunan Bendungan Boya di Kabupaten Sidrap. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Enkerang, Enrekang Chairul Latanro, jika benar-benar melakukan pembangunan Bendungan tersebut, maka akan menenggelamkan beberapa Desa di kabupaten Enrekang. Demikian dikatakannya pada saat menerima sejumlah massa, di ruang poila Kantor Bupati, Senin (29/8). “Saya mewakili Bupati menolak pembangunan Bendungan itu, jika faktanya benar-benar seperti dalam surat pernyataan ini.” ujarannya. Dalam penolakan tersebut, membuat surat pernyataan ditandatangani langsung Andi Riyan Rifaldi selaku Koordinator Lapangan. Dalam surat kesepakatan tertuang, ada tiga Desa yakni Desa Tuncung, Mangkawani dan Tapong, dianggap akan tenggelam jika dilakukan pembangunan Bendungan Boya, di Kabupaten Sidrap.

Konflik akibat dari perencanaan pembangunan bendungan tersebut bukan hanya memunculkan adanya konflik antara masyarakat dengan pemerintah tetapi juga cenderung menciptakan adanya konflik antar pemerintah daerah. Hal ini diketahui dari adanya pernyataan dari pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang Yang bertolak belakang dengan pernyataan

pemerintah Kabupaten Enrekang. Penolakan pembangunan Bendungan Boya di Desa Boiya, Kecamatan Maiwa, daerah perbatasan Sidrap-Enrekang, oleh warga setempat dinilai hanya miskomunikasi saja. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sidrap, Imran Abidin, Selasa (30/8) menjelaskan, pembangunan bendungan Boya berkapasitas penampungan air 80 sampai 100 juta perkubik yang akan dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) Sulsel dilakukan beberapa tahap. Diantaranya visit study ke lokasi rencana pembangunan untuk sosialisasikan kepada masyarakat yang terkena dampak.

Kebijakan pemerintah tentang pembangunan bendungan tersebut merupakan sebuah proyek yang diharapkan memiliki manfaat yang besar, meskipun dibalik dari manfaat tersebut terdapat juga dampak/kerugian yang besar. Spesifikasi rencana pembangunan bendungan ini, yakni Tipe Bendungan: Type Zonal, Tinggi bendungan: 45,00 meter, Panjang bendungan: 415,00 meter, Luas daerah genangan: 636,00 Ha, Tampungan total waduk: 97,45 juta m<sup>3</sup>, Tampungan efektif waduk: 66,15 juta m<sup>3</sup>, Volume sedimen: 0,92 juta m<sup>3</sup>, Debit banjir rencana PMF: 3.108,94 m<sup>3</sup>/dtk, (<http://bbwspompenganjeneberang.org>, 2016).

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang resolusi konflik dan kebijakan pemerintah daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

(Sumardjo, Sutisna, Amiruddin, Dahri, & Adi, 2014) meneliti tentang karakteristik tipologi dan pemetaan konflik di perkebunan kelapa sawit, efektivitas proses-proses penyelesaian konflik yang telah terjadi selama ini, dan menyusun strategi resolusi konflik yang sesuai dengan tipologi konflik melalui pendekatan kolaboratif yang berbasis potensi sumber daya dan kearifan lokal. (Ismail, 2011) meneliti tentang peta konflik akibat bencana lumpur Sidoarjo. (Sumanto, 2009) meneliti tentang Tujuan pengembangan perhutanan sosial adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan sehingga

dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan. (Sembiring, Basuni, & Soekmadi, 2010) meneliti tentang Konflik kepentingan telah terjadi dalam pengelolaan kawasan dan sumber daya alam Teluk Cenderawasih Taman Nasional (TNTC) di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.

#### **b. Resolusi Konflik**

Konflik adalah interaksi antar individu, kelompok dan organisasi yang membuat tujuan atau arti yang berlawanan, dan merasa bahwa orang lain sebagai pengganggu yang potensial terhadap pencapaian tujuan mereka. Putman dan Pool (Sutarto, 2012). Apa yang disangka keseimbangan sistem sosial akibat mekanisme-mekanisme fungsional mulai dilucuti kedoknya dan ditelanjangi menjadi tidak lain dari manipulasi pihak yang sedang berkuasa. Apa yang tadinya disebut “kestabilan masyarakat” (keadaan mantab) ternyata mengandung mesiu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menggoyahkan semua.

Menurut (Hugh, 2002) bahwa penyelesaian konflik dapat dibedakan menjadi strategi kompetisi, strategi akomodasi, strategi kolaborasi, strategi penghindaran, dan strategi kompromi atau negosiasi.

1. Strategi Kompetisi Merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain.
2. Strategi Akomodasi Merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri.
3. Strategi Kolaborasi Merupakan bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak.
4. Strategi Penghindaran yaitu Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri.
5. Strategi Kompromi atau Negoisasi

Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan dan saling member serta menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak.

### **C. METODE PENELITIAN**

#### **a. Pendekatan Penelitian**

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong L. J., 2007). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi

### **D. PEMBAHASAN**

#### **a. Resolusi Konflik Pembangunan Bendungan Boiya Enrekang**

Resolusi konflik merupakan salah upaya yang hendak ditempuh dalam rangka mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. Rencana pembangunan bendungan di Boiya Kabupaten Enrekang telah memicu lahirnya konflik baik secara vertikal mau horisontal. Konflik vertikalnya yaitu adanya pro dan kontra dari masyarakat terkait rencana pemerintah tersebut. Sedangkan konflik horisontalnya adalah pro dan kontra antara masyarakat yang diuntungkan dengan masyarakat yang dirugikan.

##### **1. Strategi Kompetisi**

Strategi kompetisi adalah strategi penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara membuat persaingan yang sehat kepada setiap kelompok yang dianggap memiliki kepentingan maupun tuntutan terhadap masalah yang. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi sebagai akibat dari rencana pembangunan bendungan Boiya Sidrap-Enrekang, strategi sangat tidak cocok untuk digunakan.

Munculnya konflik tersebut menjadikan terciptanya rasa takut dalam diri masyarakat. Ketakutan yang muncul adalah masyarakat yang berada pada desa yang terancam ditenggelamkan merasa akan kehilangan miliknya yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Masyarakat juga merasa takut akan adanya penggusuran yang memaksa mereka untuk meninggalkan kampung halaman yang telah dihuni sejak dari nenek moyangnya. Menurut salah satu anggota Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini memberikan pendampingan kepada masyarakat bahwa:

*Sebenarnya kita merasa terpanggil untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat yang terancam menjadi korban ketikan pembangunan tersebut dilaksanakan. Salah satu yang paling mendasari kami adalah kami menginginkan hak-hak masyarakat itu betul-betul terpenuhi. Masyarakat yang berada dalam 3 desa yang terancam tenggelam akan kehilangan mata pencahariannya meskipun disadari juga bahwa akan ada ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah, akan tetapi uang ganti rugi belum tentu atau bahkan tidak bisa menggantikan apa yang mereka miliki. (MD. Wawancara 12 Mei 2018. Pukul 19.33).*

Dari pernyataan tersebut, secara tersirat kita dapat melihat lahirnya rasa ibah dari kalangan LSM untuk terus memberikan pembelaan kepada masyarakat. Sejatinya masyarakatnya yang berada pada desa yang akan tenggelam apabila pembangunan tersebut dilaksanakan tidak mau menerima kebijakan itu. Adapun dasar mereka yaitu tidak adanya unsur manfaat yang berpihak kepada mereka. Untuk melanjutkan rencana pembangunan bendungan tersebut, pemerintah harus mampu untuk memahami kondisi, kebutuhan, serta derita yang dihadapi oleh masyarakat.

## 2. Strategi Akomodasi

Strategi akomodasi dalam penyelesaian konflik adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan setiap individu/kelompok yang berkonflik. Strategi ini dapat digunakan dalam penyelesaian konflik rencana pembangunan bendungan Boya Enrekang, melalui upaya yang dilakukan oleh pemerintah

untuk memberikan akomodasi kepada setiap korban. Akomodasi yang dimaksud disini yakni sejalan dengan salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini intens memberikan pendampingan kepada masyarakat. Menurut Mahmud (Anggota LSM),  
Bahwa;

*“Apabila pemerintah tetap ngotot untuk melanjutkan pembangunan tersebut maka langkah yang harus ditempuh adalah pemerintah harus menyiapkan terlebih lahan terlebih dahulu untuk dijadikan pengganti milik masyarakat. Kondisi sekarang kami terus memberikan pendampingan kepada masyarakat sampai ada kejelasan dari pihak terkait jadi/tidaknya pembangunan tersebut. (MD. wawancara: 12 Mei 2018. Pukul 20.12)”*.

Berdasarkan keterangan tersebut dipahami bahwa akomodasi yang dimaksud adalah pemerintah harus menyiapkan terlebih dahulu lahan sesuai dengan lahan milik masyarakat yang akan ditenggelamkan apabila rencana pembangunan tersebut benar-benar direalisasikan. Disamping itu pemerintah juga mestinya menyiapkan akomodasi untuk masyarakat sebagai bekal atau modal mereka dalam memulai kehidupan dilokasi yang telah disiapkan. Akomodasi tersebut berfungsi sebagai subsidi kepada masyarakat dalam rangka memulai pembangunan.

### 3. Strategi Penghindraan

Strategi penghindaran salah langkah penyelesaian konflik yang ditempuh dengan cara berupaya untuk menghindarkan diri dari setiap pertanyaan dan pembiaran terkait permasalahan yang ada. Mencermati konflik atas adanya rencana pembangunan bendungan di perbatasan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Enrekang dapat dilihat bahwa permasalahan ini seakan-akan tidak mendapatkan perhatian lagi dari pemerintah.

Kenyataan terbaru yang dihadapi oleh masyarakat saat ini adalah pasca terjadinya aksi penolakan massa hingga kini belum ada kejelasan yang muncul terkait jadi/tidak bendungan tersebut dibangun. Dengan kondisi demikian maka konflik yang ada seakan-akan telah berakhir,



karena hampir tidak ada lagi pemberitaan bahkan cerita di tengah-tengah masyarakat terkait pembangunan bendungan boiya. Memperhatikan kondisi tersebut menimbulkan adanya kemungkinan terjadinya konflik yang lebih besar lagi apabila suatu waktu pembangunan tersebut dilanjutkan. Kondisi saat sekarang ini, membangun keyakinan pada diri masyarakat bahwa pembangunan tersebut telah dihentikan, dan apa bila kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu kondisi ini hanya didiamkan sementara waktu maka konflik akan lebih sulit untuk dihindari. Menurut kelompok masyarakat desa yang akan ditenggelamkan bahwa:

*“Sebenarnya kita sebagai LSM bingung melihat status pembangunan tersebut disatu sisi kami mendengarkan informasi bahwa itu merupakan proyek pemerintah pusat (Nasional) disisi lain juga terdengar bahwa Pemda Enrekang telah menghentikannya. Ada kemungkinan pembangunan tersebut didiamkan untuk melewati tahun politik”.* (SL. Wawancara 5 Juli 2018. Pukul:14.30).

#### 4. Strategi Kompromi atau Negosiasi

Strategi ini pada dasarnya adalah penyelesaian konflik melalui pendekatan yang terstruktur. Dalam menjalankan aktivitas penyelesaian konflik melalui strategi ini, maka upaya untuk membangun komunikasi dua arah yang diperkuat. Sasaran yang hendak dicapai dalam strategi ini yaitu tercapainya persetujuan untuk membentuk kerjasama yang kuat. Terkait dengan konflik dalam rencana pembangunan bendungan tersebut, strategi ini belum berjalan. Upaya untuk membangun komunikasi baik antar pemerintah dengan kelompok masyarakat yang terancam akan menjadi korban, maupun dengan masyarakat yang dianggap akan menikmatinya.

Pemerintah dalam mengambil keputusan diharapkan untuk senantiasa mengambil kebijakan yang pro kepada rakyat atau pro-publik. Kebijakan publik yang pro publik memiliki kriteria melibatkan publik dalam setiap tahapan penyusunan, realistik, transparan, jelas tolok ukur

keberhasilan, jelas target atau sasaran, jelas dasar hukum, dan antar kebijakan tidak terjadi tumpang tindih atau bertentangan. Kebijakan publik dewasa ini diharapkan berfokus pada pelayanan publik, sebagai pengimbang atas pajak atau retribusi yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah (SBM, 2008).

Status rencana pembangunan Boya Enrekang sampai saat ini tidak memberikan kepastian kepada masyarakat, baik kelompok masyarakat yang diuntungkan maupun kelompok masyarakat yang dirugikan.

*“sampai hari ini kami masih tetap konsisten dengan sikap awal yaitu menolak sepenuhnya pembangunan bendungan. Disini kami tidak berbicara persoalan ganti rugi/ganti lahan tetapi kami tidak bisa menerima pembangunan itu karena selain kami telah bertahun-tahun disini juga nenek dan leluhur kami dikuburkan disini”. (LM. Wawancara: 1 Juni 2018. Pukul:10.21).*

Sikap masyarakat yang masih konsisten menolak pembangunan bendungan tersebut menjadi salah satu hambatan pengimplementasian kebijakan. Kerasnya sikap yang ditunjukkan tersebut menyebabkan sulitnya menemukan medel solusi yang efektif. Kondisi masyarakat untuk sementara hanya berada dalam satu sikap yaitu menolak kebijakan tersebut. Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat yang dianggap akan menikmati pembangunan bendungan. Masyarakat petani di Kabupaten Sidenreng Rappang:

*“Sampai saat ini kami masih sangat berharap bahwa bendungan tersebut betul-betul dibangun, karena adanya pembangunan tersebut sawah-sawah kami terairi dan bercocok tanam dengan baik tidak lagi menggantungkan diri pada alam (hujan)”. (ZF. Wawancara 4 Juni 2018. Pukul:13.24).*

Harapan petani yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya tuntutan kepada pemerintah untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Kondisi terakhir dari rencana pembangunan tersebut memunculkan kebingungan bagi beberapa pihak. Mengingat besarnya harapan dan tuntutan yang terjadi maka langkah negosiasi yang sebaik

ditempuh adalah dengan melakukan *lobby* kepada pemerintah dan masyarakat. Menurut AB Susanto lobi merupakan usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang positif terhadap topik pelobi, dengan demikian diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan (Barisan & Qodir, 2016).

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan atas hasil penelusuran dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, strategi penyelesaian konflik yang ditempuh pada konflik rencana pembangunan bendungan di Boya Enrekang adalah strategi pembiaran. pembiaran yang dilakukan yaitu membuat kondisi dimana masalah tersebut tidak lagi dimunculkan, seakan-akan permasalahan tersebut telah menemukan solusi yang baik.

### **b. Saran**

Pemerintah seharusnya menempuh jalur strategi kompromi dalam penanganan konflik tersebut. Kompromi yang dimaksudkan disini adalah pemerintah harus mampu membangun komunikasi kepada masyarakat yang terancam menjadi korban untuk memberikan kepastian atas kebijakan pembangunan bendungan tersebut. Salah satu solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat adalah meminta kesediaan masyarakat untuk bersedia dipindahkan dengan sistem ganti lahan dan pemberian akomodasi sebagai bentuk subsidi dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, K. S. (1987). *Konservasi Sumberdaya Tanah dan Air*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Antonius, dkk. (2002). *Empowerment, Stress dan Konflik*. Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Barisan, & Qodir, Z. (2016). Analisis Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Dari Aspek EKonomi, Sodial dan Politik. *Jurnal Pemerintahan & Kebijakan Publik*, Volume 3 Nomor 1 Februari. 21-36.
- berita kota Makassar. (2016, April 30). *Bendungan Boya Sedot Rp 1,2 T*. Retrieved Mei 31, 2017, from <http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2016/04/30/bendungan-boya-sedot-rp-12-t/>
- berita kota Makkasar. (2016, Agustus 31). *Penolakan Bendungan Boya Hanya Miskomunikasi*. Retrieved Mei 31, 2017, from <http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2016/08/31/penolakan-bendungan-boya-hanya-miskomunikasi/>
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- <http://bbwspompenganjeneberang.org>. (2016, 10 31). *Pertemuan Konsultan Masyarakat (PKM) Rencana Pembangunan Bendungan Boya di Kab. Sidrap dan Enrekang*. Retrieved 6 9, 2017, from <http://bbwspompenganjeneberang.org/pertemuan-konsultan-masyarakat-pkm-rencana-pembangunan-bendungan-boya-di-kab-sidrap-dan-enrekang/>
- Hugh, M. (2002). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT Raja.
- Ismail, M. (2011). PEMETAAN DAN RESOLUSI KONFLIK (Studi Tentang Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo). *Jurnal Sosiologi Islam*, 71-94.
- L. Scannell dan R. Gifford. (2010). *Journal of Environmental Psychology*, 1–10.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Muchammad Ismail. (2011). PEMETAAN DAN RESOLUSI KONFLIK (Studi Tentang Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo). *Jurnal Sosiologi Islam*, 71-94.
- Nawawi, H. (1984). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Parepos.co.id. (2016, Agustus 29). *Demonstran Tolak pembangunan Bendungan Boya di Enrekang*. Retrieved Mei 31, 2017, from

- <http://parepos.fajar.co.id/demonstran-tolak-pembangunan-bendungan-boya-di-enrekang/>
- Pruitt dan Rubin. (2009). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- SBM, N. (2008). KEBIJAKAN PUBLIK YANG PRO PUBLIK. *Riptek, Vol.1, No.2* , 47-51.
- Sembiring, E., Basuni, S., & Soekmadi, R. (2010). Resolusi Konflik Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Teluk. *JMHT* , 84-91.
- Sudijono, A. (1996). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*". Bandung: Alfabeta.
- Sumanto, S. E. (2009). KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL (Social Forestry Development Policy in Conflict Resolution). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* , 13-25.
- Sumardjo Dkk. (2014). Tipologi Konflik Berbasis Sumber Daya Pangan di Wilayah Perkebunan Sawit (Conflict Typology Based on Food Resource in Palm Oil Plantation). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)* , 189-196.
- Sumardjo, Sutisna, R., Amiruddin, S., Dahri, & Adi, F. (2014). Tipologi Konflik Berbasis Sumber Daya Pangan di Wilayah Perkebunan Sawit (Conflict Typology Based on Food Resource in Palm Oil Plantation). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)* , 189-196.
- Sutarto Wijono. (2012). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Sutarto, W. (2012). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: Kencana.